

ABSTRAK

Tujuan penelitian tesis ini adalah; 1) untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) untuk menganalisis dan mengkritisi bagaimana kebijakan hukum pidana kedepan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*). Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dan Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*)? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah diskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isu hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan analisis sinkronisasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama Pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Kedua Adanya berbagai kasus tindak pidana penyelundupan manusia seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN-PCT, Nomor 116/Pid.Sus/2012/PN-PCT dan Nomor 117/Pid.Sus/2012/PN-PCT membuktikan bahwa sampai saat ini belum maksimalnya pemberlakuan aturan terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan rekomendasi bahwa: 1) Perlu dilakukan penanggulangan serius terkait permasalahan penyelundupan manusia ke wilayah Indonesia melalui kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, PBB dan instansi terkait lainnya. Pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus membuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas mengatur permasalahan Penyelundupan Manusia (*people smuggling*). 2) Pemerintah harus melakukan upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana untuk mencegah tindak pidana penyelundupan manusia, memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyelundupan manusia bagi masyarakat dan melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja imigrasi.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Penyelundupan Manusia*

PENAL POLICY AGAINST PEOPLE SMUGGLING

ABSTRACT

The objectives of this thesis are; 1)to find out and explain the regulation of the criminal act of people smuggling in the laws and regulations in Indonesia. 2)to analyze and criticize how the criminal law policy in the future against the crime of people smuggling. The issue to be discussed is how are the regulation of the crime of people smuggling in the laws and regulations in Indonesia? And what is the future criminal law policy towards the crime of people smuggling? This study uses a normative method with steps of description, systematization and explanation of positive legal issues in depth by using the concept approach, the law approach and systematic synchronization analysis. The results show that the first is the regulation of criminal acts of people smuggling is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, namely in Article 120 paragraph (1) and paragraph (2) which is a development of the previous law, namely Emergency Law Number 8 of 1955 concerning Immigration Crimes and Law Number 9 of 1992 concerning Immigration. Second, there are various cases of criminal acts of people smuggling, such as in the Decisions of the Pacitan District Court Number 115/Pid.Sus/2012/PN-PCT, Number 116/Pid.Sus/2012/PN-PCT and Number 117/Pid.Sus/2012/PN -PCT proves that until now the enforcement of regulations related to criminal acts of people smuggling has not been maximized. Based on the results of the study the authors provide recommendations that: 1)It is necessary to seriously tackle the problem of people smuggling into Indonesian territory through good cooperation between Government Agencies, Police, Ministry of Law and Human Rights, United Nations and other relevant agencies. The government in this case the executive and legislature must make special laws or policies that explicitly and clearly regulate the problem of people smuggling. 2)The government must make efforts to eradicate criminal acts of people smuggling by improving facilities and infrastructure to prevent criminal acts of people smuggling, providing socialization about the dangers of people smuggling for the community and evaluating and improving immigration performance.

Keywords: *Penal Policy, People Smuggling*